



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALLAND ASQOLANI
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENGADAAN PEMBANGKIT DAN IPP
3. NHK : 210627

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.205.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.130.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 690 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.455.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.165.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2014, LAINNYA Rp. 130.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2019, LAINNYA Rp. 340.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, LAINNYA Rp. 480.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 275.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 432.709.765**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 8.077.709.765



III. HUTANG

Rp. 565.718.739

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.511.991.026

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.